

Ketentuan pelaksanaan penertiban tanah terlantar menurut peraturan pemerintah no. 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar studi putusan kasasi tata usaha negara nomor 21/g/2013/ptun.jkt = Implementation procedures of neglected land arrangement according to government regulation no. 11 year 2010 on the control and utilization of abandoned land study of decision of state administrative court number 21/g/2013/ptun.jkt

Pardede, Chandra Nico, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476645&lokasi=lokal>

---

Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Pemberian Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kakan serta Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar PP Tanah Terlantar secara regulasi dan kebijakan dapat dibenarkan, karena secara aspek hukum formil dapat dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang diberikan oleh PP Tanah Terlantar. Namun didalam penerapannya banyak hal yang menjadi kendala dalam menerapkan hal tersebut, terutama kendala dalam aspek regulasi yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi unsur pendorong terjadinya potensi tanah terlantar. Maka dengan hal tersebut Tesis yang berjudul Ketentuan Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mencoba mengkaji beberapa aspek yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan Tanah terlantar khususnya pada Kawasan Hutan yang dalam memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha HGU yang berada di dalam Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor Nomor 21/G/2013/PTUN.Jkt . Hasil penelitian dari Tesis ini mendapatkan beberapa aspek yang menjadi kendala terutama didalam pengurusan perizinan pada Kawasan Hutan yang ingin dimanfaatkan oleh pemegang hak atas tanah, hal ini karena peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai regulasi dan aspek-aspek khusus yang dapat menjadi alasan pemegang hak tetap dapat mempertahankan hak atas tanahnya dan BPN sebagai pemberi Surat Keputusan dapat bekerja dengan maksimal tanpa harus terdapat tuntutan hukum dikemudian hari atas Surat Keputusan yang dikeluarkan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Provision of Decree issued by Head of Land Office Head of Land Office and Head of National Land Agency according to Government Regulation Number 11 Year 2010 Regarding Control and Utilization of Abandoned Land GR Abandoned Land regularly and accessible, because it is operationally adjustable. has fulfilled all that is given by GR Abandoned Land. In practice, however, much is needed in this regard, indispensable in the provision given by law which is the sole impetus for the potential for abandoned land. So with this Thesis entitled Implementation Provisions of Land Terangarized Regulation Based on Government Regulation No. 11 of 2010 on the Control and Utilization of Prohibited Land to examine several factors that will be used in the implementation of the policy Cultivation Right within the Decision Cassation of State Administration Number 21 G 2013 PTUN.Jkt . The results of this thesis are some of the most important aspects of licensing in the forest areas that the DATA wants to use, this is because the rules

do not allow for the right reasons. permanent right may increase the right to land and BPN as a decision maker who can work maximally without having any legal risk in the future on the issued Decree.